Vol. 5, No. 3, 2026, pp. 1525 - 1534
DOI: 10.29210/arbitrase.v5i3

Contents lists available at insancendikia.or.id

ARBITRASE
(Journal of Economics, Accounting, Management and Business)
ISSN : 3124-8985

Journal homepage: https://ojs.insancendekia.or.id/index.php/Arbitrase

Pengaruh Edukasi Pajak, Kemudahan Sistem Pembayaran Digital, dan Kemampuan Keuangan terhadap Minat Wajib Pajak di Desa Kampung Nipah Wilayah Papanggo 2, Jakarta Utara

Elmalia Triani[1], Sri Agustina[2]
[1,2]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten

Article Info

Keyword:

Tax Education, Ease of Digital Payment Systems, Financial Capability, Taxpayers' Interest.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax education, ease of digital payment systems, and financial capability on taxpayers' interest in Kampung Nipah Village, Papanggo 2 Area, North Jakarta, both partially and simultaneously. The background of this study is based on the importance of increasing taxpayers' interest in fulfilling their tax obligations as an effort to support the optimization of state revenue. Tax education, the ease of using digital payment systems, and financial capability are assumed to be factors influencing taxpayers' interest in carrying out their tax obligations. This research employed a quantitative method with an associative approach. The population consisted of 100 individual taxpayers residing in Kampung Nipah Village, Papanggo 2 Area, North Jakarta. The sampling technique used was a purposive sampling, in which the entire population was selected as the research sample. Data were collected through questionnaires using a four-point Likert scale. The data were analyzed using IBM SPSS Statistics Version 24, including validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, partial hypothesis testing (t-test), simultaneous hypothesis testing (F-test), and the coefficient of determination (R^2). The results indicate that tax education has a positive and significant effect on taxpayers' interest. The ease of digital payment systems also has a positive and significant effect on taxpayers' interest. Likewise, financial capability has a positive and significant effect on taxpayers' interest. Simultaneously, tax education, ease of digital payment systems, and financial capability have a positive and significant effect on taxpayers' interest in Kampung Nipah Village, Papanggo 2 Area, North Jakarta.

© 2020 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0

Corresponding Author:
Elmalia Triani
Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Banten. Indonesia
Email: elmaliatriani6@gmail.com

Pendahuluan

Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat kegiatan ekonomi memiliki jumlah wajib pajak yang besar, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Namun demikian, tingginya jumlah wajib pajak terdaftar belum sepenuhnya diikuti oleh tingginya minat dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Fenomena ini terlihat dari rendahnya tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan keterlambatan pembayaran pajak di kalangan wajib pajak di beberapa wilayah perkotaan meskipun

layanan digital telah disediakan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan administrasi perpajakan dan perilaku wajib pajak di lapangan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Minat wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan. Dalam konteks perpajakan, minat dapat diartikan sebagai kecenderungan atau dorongan dari dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa minat wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pemahaman perpajakan, persepsi terhadap sistem pajak, serta kualitas pelayanan fiskus. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2014) menemukan bahwa pemahaman perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan edukasi dan pelayanan perpajakan dapat mendorong tumbuhnya minat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Supadmi, 2014).

Fenomena terkait minat wajib pajak di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan rendahnya kesadaran dan ketertarikan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Banyak wajib pajak yang hanya melaksanakan kewajiban pajaknya ketika terdapat tekanan, seperti pemeriksaan atau sanksi administrasi. Selain itu, sebagian masyarakat masih memandang pajak sebagai beban, bukan sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Kurangnya transparansi pemanfaatan pajak dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah juga menjadi faktor yang memengaruhi minat wajib pajak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya peningkatan kepatuhan tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi, tetapi juga pada bagaimana membangun minat dan kesadaran wajib pajak melalui pendekatan edukatif dan persuasif (Rahayu, 2017).

Dalam kajian perilaku perpajakan, salah satu faktor penting yang memengaruhi minat dan kepatuhan wajib pajak adalah edukasi perpajakan. Edukasi perpajakan membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya sehingga meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban pajak. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa penggunaan konten digital dan pemahaman media digital dalam edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang merupakan bagian dari minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka (Darmian, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan hubungan antara edukasi perpajakan dan minat wajib pajak. Sari (2020) menyatakan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, Pratama (2021) menemukan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan melalui program edukasi mampu meningkatkan kesadaran dan minat wajib pajak secara signifikan. Penelitian lain oleh Wulandari (2022) juga menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi perpajakan berbasis digital memiliki pengaruh positif terhadap minat wajib pajak orang pribadi. Namun demikian, terdapat perbedaan hasil pada penelitian oleh Andini (2023) yang menyatakan bahwa edukasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak, karena faktor kepercayaan terhadap pemerintah lebih dominan memengaruhi perilaku wajib pajak. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait efektivitas edukasi perpajakan dalam meningkatkan minat wajib pajak di era digital.

Selain itu, digitalisasi sistem perpajakan seperti penggunaan *e-filing* dan *e-billing* juga berperan penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. Digitalisasi perpajakan terbukti mempunyai hubungan positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama ketika literasi digital wajib pajak memadai, yang menunjukkan bahwa sistem digital dapat mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak sehingga mendorong minat wajib pajak untuk patuh pada kewajiban mereka (Bagus et al., 2025).

Selain edukasi dan digitalisasi, kondisi keuangan atau kemampuan ekonomi wajib pajak juga berpengaruh terhadap minat mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dengan literasi keuangan yang baik cenderung lebih mampu merencanakan pembayaran pajak sehingga meningkatkan kepatuhan. Penelitian lain menunjukkan bahwa literasi keuangan dan budaya pajak yang tinggi berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak, terutama ketika digitalisasi perpajakan turut

memoderasi hubungan tersebut, memperkuat bukti bahwa kemampuan keuangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan minat wajib pajak (Nasikhah & Prasetyo, 2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan adanya perbedaan hasil terkait pengaruh kemampuan keuangan terhadap minat wajib pajak. Sari (2020) menyatakan bahwa kemudahan sistem pembayaran digital yang didukung oleh kemampuan finansial wajib pajak berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak. Selanjutnya, Putra (2021) menemukan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan minat dan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak lebih mampu mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak. Penelitian oleh Lestari (2022) juga menunjukkan bahwa kondisi ekonomi wajib pajak berpengaruh positif terhadap minat membayar pajak, terutama pada wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan hasil penelitian Rahman (2023) yang menyatakan bahwa kemampuan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak, melainkan faktor kesadaran dan moral pajak yang lebih dominan. Adanya perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya research gap yang perlu diteliti lebih lanjut, khususnya mengenai bagaimana peran kemampuan keuangan dalam memengaruhi minat wajib pajak di tengah perkembangan sistem perpajakan digital.

Variabel X_3 dalam penelitian ini adalah kemampuan keuangan wajib pajak. Kemampuan keuangan merupakan kondisi di mana wajib pajak memiliki kecukupan sumber daya ekonomi serta kemampuan dalam mengelola keuangan secara efektif. Kemampuan ini berkaitan erat dengan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak yang memiliki kondisi finansial yang stabil dan perencanaan keuangan yang baik cenderung lebih siap dalam mengalokasikan dana untuk pembayaran pajak. Dengan demikian, semakin baik kemampuan keuangan seseorang, maka semakin tinggi pula kemungkinan munculnya minat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sebaliknya, keterbatasan finansial dapat menjadi hambatan yang menurunkan minat wajib pajak, karena pajak sering kali dipersepsikan sebagai beban tambahan di tengah kebutuhan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kemampuan keuangan tidak hanya memengaruhi aspek teknis pembayaran pajak, tetapi juga memengaruhi sikap dan persepsi wajib pajak terhadap kewajiban tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat beberapa temuan yang mengkaji hubungan antara kemampuan keuangan dan minat wajib pajak. Sari (2020) menyatakan bahwa kemampuan keuangan berpengaruh positif terhadap minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Putra (2021) yang menemukan bahwa wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang baik cenderung memiliki tingkat minat dan kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki keterbatasan finansial. Selain itu, penelitian oleh Lestari (2022) juga menunjukkan bahwa literasi dan kemampuan pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak orang pribadi. Namun demikian, hasil berbeda ditemukan oleh Rahman (2023) yang menyatakan bahwa kemampuan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat wajib pajak, melainkan faktor kesadaran dan moral pajak yang lebih dominan. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya research gap yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai sejauh mana kemampuan keuangan benar-benar memengaruhi minat wajib pajak dalam konteks ekonomi dan sistem perpajakan yang terus berkembang.

Berdasarkan berbagai temuan empiris terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat wajib pajak dipengaruhi oleh edukasi perpajakan, kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital, dan kemampuan keuangan wajib pajak. Walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui penyediaan layanan digital dan edukasi perpajakan, kesenjangan antara kebijakan dan praktik menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif meningkatkan minat dan kepatuhan wajib pajak di realitas lapangan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih belum optimal. Kondisi tersebut menjadi relevan untuk dikaji pada wajib pajak orang pribadi di Desa Kampung Nipah Wilayah Papanggo 2 Jakarta Utara, khususnya untuk mengetahui apakah edukasi pajak, kemudahan sistem pembayaran digital, dan kemampuan keuangan berkaitan dengan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dan dilaksanakan pada Februari–Juni 2026 di Kampung Nipah, Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara. Data diperoleh dari 100 responden melalui kuesioner. Kriteria responden mencakup wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di lokasi penelitian, memiliki kewajiban perpajakan, dan bersedia berpartisipasi.

Variabel bebas terdiri atas edukasi pajak, kemudahan sistem pembayaran digital, dan kemampuan keuangan, sedangkan variabel terikat adalah minat wajib pajak. Setiap variabel diukur menggunakan lima butir pernyataan dengan skala Likert empat tingkat, yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Skor masing-masing jawaban berkisar dari satu sampai empat, sehingga skor total setiap variabel berkisar dari lima sampai dua puluh.

Edukasi pajak mencakup pemahaman peraturan, prosedur pembayaran, informasi perpajakan, dan pengalaman memperoleh sosialisasi. Kemudahan sistem pembayaran digital berkaitan dengan persepsi kemudahan penggunaan dan akses sistem. Kemampuan keuangan menggambarkan kondisi pendapatan, kestabilan keuangan, dan ketersediaan dana. Minat wajib pajak mencerminkan keinginan untuk membayar dan melaporkan pajak serta memenuhi kewajiban tepat waktu.

Model penelitian dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan : Y adalah minat wajib pajak, X_1 adalah edukasi pajak, X_2 adalah kemudahan sistem pembayaran digital, X_3 adalah kemampuan keuangan, α adalah konstanta, β merupakan koefisien regresi; dan ε adalah galat. Pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi 5%.

Analisis dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics 24 melalui statistik deskriptif, pengujian kualitas instrumen, pengujian asumsi regresi, regresi linear berganda, uji *t*, uji *F*, dan koefisien determinasi.

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Penelitian melibatkan 100 responden dengan karakteristik yang beragam. Profil responden berdasarkan jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan kepemilikan NPWP disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	56	56%
	Perempuan	44	44%
Usia	17–25 tahun	21	21%
	26–35 tahun	40	40%
	36–45 tahun	22	22%
	Lebih dari 45 tahun	17	17%
Pekerjaan	PNS	4	4%
	Karyawan swasta	46	46%
	Karyawan BUMN	9	9%
	Wiraswasta	24	24%
	Mahasiswa	10	10%
	Ibu rumah tangga	6	6%
	Pengemudi ojek daring	1	1%
Kepemilikan NPWP	Memiliki	99	99%
	Tidak memiliki	1	1%

Sumber: Data primer diolah oleh peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 1, responden didominasi laki-laki sebesar 56% dan kelompok usia 26–35 tahun sebesar 40%. Berdasarkan pekerjaan, karyawan swasta merupakan kelompok terbesar, yaitu 46%, diikuti wiraswasta sebesar 24%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa penelitian terutama menggambarkan persepsi responden yang bekerja sebagai karyawan swasta dan menjalankan usaha. Sebanyak 99 responden memiliki NPWP, sedangkan satu responden tidak memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan karakteristik administratif dan tidak digunakan sebagai bukti bahwa responden telah memenuhi seluruh kewajiban pembayaran maupun pelaporan pajaknya.

Statistika Deskriptif

Tabel 2. Statistika Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Minat_Wajib_Pajak	100	5.00	20.00	17.3600	.21533	2.15332
Edukasi_Pajak	100	7.00	20.00	17.3100	.17038	1.70380
Kemudahan_Sistem_Pembayaran_Pajak	100	9.00	20.00	17.4800	.17837	1.78365
Kemampuan_Keuangan	100	5.00	20.00	17.3400	.22212	2.22120
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Output IBM SPSS Statistics 24 (2026).

Berdasarkan Tabel 2, rata-rata skor seluruh variabel mendekati batas atas rentang pengukuran. Kemudahan sistem pembayaran digital memiliki rata-rata tertinggi sebesar 17,48, sedangkan edukasi pajak sebesar 17,31. Hasil tersebut menggambarkan kecenderungan penilaian positif responden terhadap variabel yang diukur. Kemampuan keuangan memiliki simpangan baku terbesar, yaitu 2,22120. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban mengenai kondisi keuangan lebih bervariasi dibandingkan jawaban mengenai edukasi pajak dan kemudahan sistem pembayaran digital. Variasi tersebut relevan untuk diperhatikan karena responden memiliki latar belakang pekerjaan dan pendapatan yang berbeda.

Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel	Item	*r* hitung	*r* tabel	Keterangan
Edukasi Pajak (X_1)	X_1.1	0,554	0,195	Valid
	X_1.2	0,657	0,195	Valid
	X_1.3	0,670	0,195	Valid
	X_1.4	0,704	0,195	Valid
	X_1.5	0,751	0,195	Valid
Kemudahan Sistem Pembayaran Digital (X_2)	X_2.1	0,692	0,195	Valid
	X_2.2	0,714	0,195	Valid
	X_2.3	0,558	0,195	Valid
	X_2.4	0,501	0,195	Valid
	X_2.5	0,669	0,195	Valid
Kemampuan Keuangan (X_3)	X_3.1	0,722	0,195	Valid
	X_3.2	0,734	0,195	Valid
	X_3.3	0,738	0,195	Valid
	X_3.4	0,737	0,195	Valid
	X_3.5	0,799	0,195	Valid
Minat Wajib Pajak (Y)	Y1	0,748	0,195	Valid
	Y2	0,749	0,195	Valid

Variabel	Item	*r* hitung	*r* tabel	Keterangan
	Y3	0,718	0,195	Valid
	Y4	0,759	0,195	Valid
	Y5	0,784	0,195	Valid

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh 20 butir pernyataan memiliki nilai *r* hitung lebih besar daripada *r* tabel yang digunakan, yaitu 0,195. Nilai *r* hitung variabel edukasi pajak berkisar antara 0,554–0,751, kemudahan sistem pembayaran digital antara 0,501–0,714, kemampuan keuangan antara 0,722–0,799, dan minat wajib pajak antara 0,718–0,784. Dengan demikian, seluruh butir memenuhi kriteria validitas yang digunakan dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

Uji Reliabilitas

Tabel 4. Uji Reliabilitas

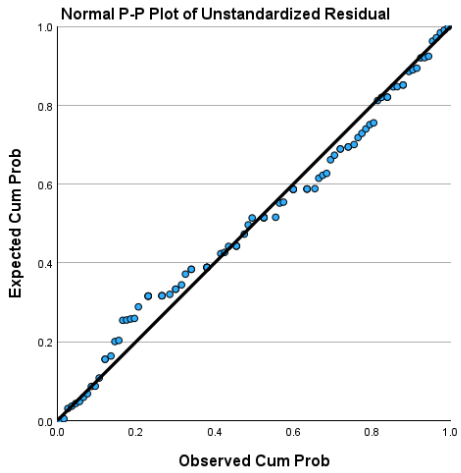
Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Edukasi_Pajak	52.1800	30.088	.660	.864
Kemudahan_Sistem_Pembayaran_Pajak	52.0100	28.111	.742	.834
Kemampuan_Keuangan	52.1500	23.361	.793	.812
Minat_Wajib_Pajak	52.1300	24.741	.744	.832

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan hasil Uji Reabilitas, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 artinya menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat tinggi. Hal ini berarti setiap butir pernyataan pada variabel Edukasi Pajak (X_1), Kemudahan Sistem Pembayaran Digital (X_2), Kemampuan Keuangan (X_3), dan Minat Wajib Pajak (Y) mampu mengukur konstruk yang sama secara konsisten, sehingga instrumen layak digunakan dalam proses analisis data selanjutnya

Uji Asumsi Klasik



Gambar 1. Uji Normalitas
Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Gambar 1, titik-titik pada grafik *P–P plot* berhimpit atau sejajar sangat dekat dengan garis diagonal, maka asumsi normalitas terpenuhi. Model regresi dianggap valid untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 5. Uji Multikolinieritas

Variabel	*Tolerance*	VIF	Keterangan
Edukasi Pajak (X_1)	0,597	1,676	Tidak terjadi multikolinearitas
Kemudahan Sistem Pembayaran Digital (X_2)	0,458	2,185	Tidak terjadi multikolinearitas
Kemampuan Keuangan (X_3)	0,425	2,354	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa edukasi pajak, kemudahan sistem pembayaran digital, dan kemampuan keuangan memiliki nilai *tolerance* masing-masing sebesar 0,597; 0,458; dan 0,425, serta VIF sebesar 1,676; 2,185; dan 2,354. Seluruh nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, sehingga model regresi tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

Tabel 6. Uji Heterokedastisitas

Variabel	*t* Hitung	Sig.	Keterangan
Edukasi Pajak (X_1)	-2,111	0,037	Terjadi heteroskedastisitas
Kemudahan Sistem Pembayaran Digital (X_2)	0,507	0,613	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kemampuan Keuangan (X_3)	0,283	0,777	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 6, uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi edukasi pajak sebesar 0,037 < 0,05, sedangkan kemudahan sistem pembayaran digital dan kemampuan keuangan masing-masing sebesar 0,613 dan 0,777 > 0,05. Dengan demikian, model regresi menunjukkan gejala heteroskedastisitas sehingga asumsi kesamaan varians residual belum terpenuhi.

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	2,303

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS, 2026

Hasil uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin–Watson sebesar 2,303. Penentuan ada atau tidaknya autokorelasi perlu didasarkan pada perbandingan nilai tersebut dengan batas dL dan dU sesuai jumlah observasi, jumlah variabel bebas, dan tingkat signifikansi, sehingga kedekatannya dengan angka 2 belum cukup untuk memastikan model bebas autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel (bebas) terhadap satu variabel dependen (terikat).

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	**Koefisien Regresi (B)**	***t* Hitung**	**Sig.**
Konstanta	1,143	0,688	0,493
Edukasi Pajak (X_1)	0,260	2,342	0,021
Kemudahan Sistem Pembayaran Digital (X_2)	0,263	2,173	0,032
Kemampuan Keuangan (X_3)	0,411	4,069	<0,001

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 8, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 1{,}143 + 0{,}260X_1 + 0{,}263X_2 + 0{,}411X_3$$

Keterangan:
$\hat{Y}$ = Prediksi minat wajib pajak
X_1 = Edukasi pajak
X_2 = Kemudahan sistem pembayaran digital
X_3 = Kemampuan keuangan

Konstanta sebesar 1,143 menunjukkan nilai prediksi minat wajib pajak ketika seluruh variabel independen bernilai nol. Konstanta memiliki nilai *t* sebesar 0,688 dan signifikansi 0,493 > 0,05 sehingga tidak berbeda secara signifikan dari nol. Edukasi pajak memiliki koefisien sebesar 0,260. Artinya, setiap kenaikan satu satuan skor edukasi pajak berkaitan dengan peningkatan prediksi minat wajib pajak sebesar 0,260 satuan, dengan variabel lainnya tetap. Nilai t sebesar 2,342 dan signifikansi 0,021 < 0,05 menunjukkan bahwa koefisien edukasi pajak positif dan signifikan.

Kemudahan sistem pembayaran digital memiliki koefisien sebesar 0,263. Setiap kenaikan satu satuan skor variabel tersebut berkaitan dengan peningkatan prediksi minat wajib pajak sebesar 0,263 satuan, dengan variabel lainnya tetap. Nilai *t* sebesar 2,173 dan signifikansi 0,032 < 0,05 menunjukkan bahwa koefisien kemudahan sistem pembayaran digital positif dan signifikan. Kemampuan keuangan memiliki koefisien sebesar 0,411. Setiap kenaikan satu satuan skor kemampuan keuangan berkaitan dengan peningkatan prediksi minat wajib pajak sebesar 0,411 satuan, dengan variabel lainnya tetap. Nilai *t* sebesar 4,069 dan signifikansi < 0,001 menunjukkan bahwa koefisien kemampuan keuangan positif dan signifikan.

Berdasarkan hasil uji *t* yang dilaporkan, ketiga variabel independen memiliki hubungan positif dan signifikan dengan minat wajib pajak secara parsial. Namun, temuan heteroskedastisitas pada pengujian sebelumnya perlu ditangani agar kesimpulan signifikansi didukung oleh galat baku yang sesuai.

Tabel 9. Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	0,747	0,558	0,544	1,45357

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Nilai R Square (R^2) sebesar 0,558 menunjukkan bahwa edukasi pajak, kemudahan sistem pembayaran digital, dan kemampuan keuangan secara bersama-sama menjelaskan 55,8% variasi minat wajib pajak, sedangkan 44,2% sisanya belum dijelaskan oleh model. Setelah penyesuaian terhadap jumlah variabel independen dan ukuran sampel, nilai Adjusted R Square sebesar 0,544 menunjukkan kemampuan penjelasan model sebesar 54,4%.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji *F*)

Model	F Hitung	Sig.	Keterangan
Regresi	40,419	< 0,001	Berpengaruh signifikan secara simultan

Sumber: Data Primer Diolah SPSS, 2026

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai *F* sebesar 40,419 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Edukasi Pajak, Kemudahan Sistem Pembayaran Digital, dan Kemampuan Keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Wajib Pajak.

Kesimpulan

Penelitian terhadap 100 wajib pajak orang pribadi di Kampung Nipah, Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara, menunjukkan bahwa edukasi pajak, kemudahan sistem pembayaran digital, dan kemampuan keuangan memiliki koefisien positif serta signifikan secara parsial berdasarkan hasil regresi yang dilaporkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan, kemudahan penggunaan layanan pembayaran digital, dan kemampuan keuangan berkaitan dengan meningkatnya minat wajib pajak. Secara bersama-sama, ketiga variabel menjelaskan 55,8% variasi minat wajib pajak, sedangkan sisanya belum dijelaskan oleh model penelitian. Hasil tersebut menempatkan aspek pengetahuan, akses teknologi, dan kondisi keuangan sebagai pertimbangan dalam pengembangan program perpajakan masyarakat. Namun, temuan heteroskedastisitas mengharuskan kesimpulan signifikansi ditafsirkan secara hati-hati dan diperiksa kembali menggunakan galat baku yang sesuai. Minat yang diukur juga belum menunjukkan kepatuhan aktual dalam pembayaran maupun pelaporan pajak.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah dan otoritas pajak disarankan memperkuat edukasi perpajakan yang mudah dipahami, menyederhanakan layanan pembayaran digital, serta menyediakan pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat. Wajib pajak diharapkan aktif mencari informasi, meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan, dan memanfaatkan layanan digital secara tepat. Universitas dapat mendukung upaya tersebut melalui kegiatan pengabdian masyarakat, bimbingan penelitian, dan pelatihan metodologi. Penelitian ini terbatas pada satu wilayah, menggunakan tiga variabel independen, serta mengandalkan jawaban kuesioner yang dipengaruhi persepsi responden. Oleh karena itu, hasilnya belum dapat digeneralisasikan secara luas dan belum menggali alasan perilaku wajib pajak secara mendalam. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah dan jumlah responden, menambahkan variabel yang relevan, serta menggunakan wawancara atau metode campuran. Penyempurnaan analisis statistik juga diperlukan agar pengujian hipotesis mempertimbangkan karakteristik residual dan menghasilkan kesimpulan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Referensi

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol.50 No.2, 179-211.

Akuntansi., J. R. (2020). Pengetahuan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. JREA, Vol.8 No.2, 98 - 110.

Bagus, P., & Sulkiah. (2025). The Impact of E-Filing and Digital Tax Administration on Taxpayer Compliance in Emerging Economies: Evidence from Lombok. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol.9 No.1, 316 - 325.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, Vol.13 No.3, 319 - 340.

Endrianto, F., & Nugroho, L. (2025). The Influence of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, and Government Trust as Moderating Variables on Taxpayer Compliance(Empirical Study: On UmkmRegistered at the Jakarta Palmerah Pratama Tax Office). PelitaJurnal Penelitian, Terapan dan Aplikatif, Vol. 2 No. 1, 37-48.

Fauziy, M., & Nazir, N. (2023). THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS, TAX KNOWLEDGE, TAX SANCTIONS AND QUALITY OF FISKUS SERVICES ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE REGISTERED AT KPP PRATAMA JAKARTA PALMERAH. Jurnal Ekonomi Vol.12 No.1, 812 - 817.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 Edisi ke-9. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Khozen, I. &. (2023). Managing taxpayer compliance: Reflections on the drivers of willingness to pay taxes in times of crisis. Cogent Business & Management, 10(2),. Taylor & Francis (Cogent Business & Management), Article 2218176.

Kurniawan, D. (2019). THE INFLUENCE OF TAX EDUCATION DURING HIGHER EDUCATION ON TAX KNOWLEDGE AND ITS EFFECT ON PERSONAL TAX COMPLIANCE. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Vol.9 No.2, 120 - 235.

L, D. (2021). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Lietrasi Akuntansi Vol 1 No.1, 75 - 82.

Nasikhah, & S. P. (2025). DAMPAK LITERASI KEUANGAN DAN BUDAYA PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK YANG DIMODERASI OLEH DIGITALISASI PERPAJAKAN. Financial Literacy, Tax Culture, Tax Compliance, Individual Taxpayer, Digitalization of Taxation Vol.9 No.1.

Pradnyani, N. L. (2021). Determinan minat wajib pajak dalam menerapkan sistem e-filing di KPP Pratama Badung Selatan. E-Jurnal Akuntansi, 31(7).

Prastyatini, S. L. (2023). The role of income level in predicting taxpayer compliance: The attribution theory and technology acceptance model approach. Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit, 10 Vol.2, 77–90.

Rahayu, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan e-Filing sebagai sarana pelaporan pajak (Studi empiris wajib pajak orang pribadi di Kediri). Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis, 12(1), 41–54.

Ramadhani, N. &. (2024). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi, 2 Vol.4, 58–67.

Review., I. J. (2021). Digitalisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. . IJLER, Vol.12 No.1, 55 - 70 .

Safitri, A. D. (2023). The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Fiscus Services on Taxpayer Compliance Registered with KPP Pratama Jakarta Kemayoran in 2022. ournal of Public Administration and Political Science and International Relations Vol 1 No.1, 1-14.

Silva, A., Farida, S., & Mihadi, P. (2025). Digital Literacy of Taxpayers and Its Effect on Compliance with Annual Tax Return (SPT) Reporting in Indonesia. PelitaJurnal Penelitian, Terapan dan Aplikatif Vol.2 No.1, 58 - 64 .

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Susanto, Y. &. (2023). Taxpayer Compliance: Taxpayer Behavior Analysis and Tax Awareness as a Mediating Variable in Indonesia. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol.25 No 1, 197 - 206.

Wulandari Laksmi, K. A. (2022). Pengaruh faktor-faktor internal diri wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5(3), 1355–1359.